

Akomodasi Modal Sosial Inklusif Difabel Siaga Bencana (Difagana) Dalam Sistem Manajemen Bencana Berbasis Masyarakat di D.I.Yogyakarta

by Jogja Datanesia

Submission date: 07-Oct-2021 10:37AM (UTC+0500)

Submission ID: 1667545456

File name: istem_Manajemen_Bencana_Berbasis_Masyarakat_di_DI_Yogyakarta.pdf (354.16K)

Word count: 6693

Character count: 46311

Akomodasi Modal Sosial Inklusif Difabel Siaga Bencana (Difagana) Dalam Sistem Manajemen Bencana Berbasis Masyarakat di D.I.Yogyakarta

Aulia Widya Sakina¹⁾, Yuli Setyowati²⁾, dan Oktarina Albizzia³⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Sosiatri
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD Yogyakarta
Jalan Timoho 317 Yogyakarta

²⁾Program Studi Ilmu Komunikasi
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD Yogyakarta
Jalan Timoho 317 Yogyakarta

³⁾Program Studi Ilmu Sosiatri
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD Yogyakarta
Jalan Timoho 317 Yogyakarta

e-mail: aulia.widya.sakina@gmail.com¹⁾,
gracedista72@gmail.com²⁾,
oktarinaalbizzia@gmail.com³⁾

Abstrak

Difabel Siaga Bencana (Difagana) D.I.Yogyakarta sebagai Difagana pertama di Indonesia merupakan wadah berhimpun difabel terlatih dalam sistem manajemen bencana. Keberadaan Difagana sebagai bagian dari transformasi sistem manajemen bencana berbasis masyarakat merupakan *soft campaign* dalam mewujudkan daerah tangguh bencana. Difagana dituntut untuk bisa meningkatkan modal sosial inklusif dalam menghadapi situasi bencana bagi diri sendiri, keluarga maupun tetangga, sehingga permasalahan penanggulangan bencana bisa dipahami sebagai upaya meningkatkan kemampuan Difagana dalam mengurangi resiko bencana di sekitar kehidupannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi modal sosial inklusif Difagana dalam sistem manajemen bencana berbasis masyarakat di D.I.Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penguatan modal sosial Difagana terlihat dari adanya sikap saling percaya, terbentuknya kerja sama dan kohesifitas, pranata sosial yang kuat, saling tukar kebaikan, perluasan jaringan, serta peningkatan partisipasi guna peningkatan daya saing kolektif secara berkelanjutan. Kekuatan modal sosial Difagana dibangkitkan oleh nilai yang membentuk jaringan *mutual trust*, *mutual respect* dan *mutual benefit*. Hal ini dapat dipahami menggunakan tiga kerangka modal sosial yakni *social bonding*, *social bridging*, dan *social linking*.

Keberadaan Difagana dengan kondisi modal sosial yang baik, diikuti dengan semangat juang yang tinggi dan kepemimpinan yang kuat, ternyata belum sepenuhnya mengakomodasi sistem manajemen bencana yang inklusif. Pembentukan struktur yang diciptakan oleh pemerintah ini masih berfokus pada pemenuhan hasil dibanding pemenuhan kebutuhan masing-masing kriteria disabilitas. Belum optimalnya pemanfaatan modal sosial yang merupakan nilai-nilai dan hubungan-hubungan sosial yang mengakar dalam struktur Difagana mengakibatkan pelaksanaan program belum bisa dilaksanakan, berkesinambungan antar waktu, antar generasi dan antar kalangan.

Kata Kunci: *Difagana, manajemen bencana, modal sosial*

1. Pendahuluan

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) termasuk daerah rawan bencana alam di Indonesia. Selain karena kondisi geologi yang menunjang terjadinya bencana alam, keberadaan Gunung Merapi di sebelah utara yang merupakan salah satu gunung berapi teraktif di dunia dan Samudera Hindia di sisi selatan, menjadikan DIY sangat akrab dengan bencana. Bencana alam yang terjadi di DIY tidak hanya menimbulkan kerugian harta benda tetapi juga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Belajar dari pengalaman dalam menanggulangi bencana alam yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, penanggulangan bencana yang selama ini dilakukan di DIY masih dihadapkan dengan berbagai kendala, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Di tingkat pemerintah terlihat lemahnya koordinasi antara pemerintah dan stakeholder lainnya, baik dalam tahap pra bencana, pada saat terjadi bencana maupun pada saat pasca bencana. Sementara itu, di tingkat masyarakat, nampak bahwa kemampuan masyarakat dalam penanggulangan bencana masih rendah (Febriana, dkk., 2015).

Pengalaman yang terjadi sampai saat ini masih menunjukkan bahwa manajemen penanggulangan bencana dominan dilakukan dengan mekanisme eksternal, yaitu penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar komunitas masyarakat. Sementara masyarakat setempat hanya dijadikan objek dari suatu program, sehingga aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana yang dirancang untuk memberikan kerangka kerja bagi orang-perorangan atau komunitas yang berisiko terkena bencana untuk menghindari, mengendalikan risiko, mengurangi, menanggulangi maupun memulihkan diri dari dampak bencana (Lestari, Prabowo dan Wibawa, 2012), belum tersampaikan secara menyeluruh di masyarakat.

Selama ini kaum difabel sebagai salah satu kelompok rentan di masyarakat merupakan kelompok beresiko tinggi yang cenderung tidak “terlihat” selama terjadi bencana. Hal ini dikarenakan keterbatasan mereka dalam mengakses lingkungan fisik, informasi dan komunikasi, pengetahuan, serta keterbatasan keterampilan maupun kemampuan. Jumlah penyandang disabilitas di DIY yang terus mengalami peningkatan, yakni berjumlah 25.050 orang tahun 2015, menjadi 26.177 orang di tahun 2016 dan 29.530 di tahun 2017, juga menjadi polemik tersendiri bagi pemerintah. Berikut persentase jumlah penyandang disabilitas berdasarkan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Sarana Kesejahteraan Sosial Provinsi DIY Tahun 2017:

Tabel 1.1
Persentase Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta

| Kabupaten/ kota | Persentase Penyandang Disabilitas |
|-----------------|-----------------------------------|
| Bantul | 23,67% |
| Sleman | 23,30 % |
| Yogyakarta | 6,59% |
| Kulonprogo | 18,57% |
| Gunung Kidul | 27,88 % |

Sumber: Aplikasi Dataku BAPPEDA DIY, 2017

Berdasarkan data tersebut maka pada akhir tahun 2016 dibentuk Difabel Siaga Bencana (Difagana) di DIY. Difagana pertama di Indonesia ini, berada di bawah koordinasi Dinas Sosial Provinsi D.I.Yogyakarta, serta dilatih langsung oleh Tagana, LSM dan PMI. Anggota Difagana mendapat berbagai pelatihan tentang pembinaan karakter, pengurangan resiko bencana, sistem dapur umum, simulasi bencana, hingga kemampuan medis (P3K). Pada tahun 2018, Difagana DIY juga turut bergabung dengan relawan bencana gempa bumi di Lombok dan Palu, serta tsunami di Banten dan Lampung.

Melalui keberadaan Difagana sebagai Sahabat Tagana, proses penanggulangan bencana diharapkan bisa dilaksanakan secara berkesinambungan antar waktu, antar generasi dan antar kalangan dengan mengakomodasi modal sosial inklusif Difagana. Pencantuman aspirasi dan kebutuhan penyandang disabilitas di seluruh tahap manajemen bencana, khususnya dalam tahap

mitigasi dan kesiapsiagaan, dapat mengurangi kerentanan dan meningkatkan efektivitas upaya tanggap darurat dan *recovery* yang dilakukan pemerintah (United Nations, 2012).

Pendekatan ini pada dasarnya mensyaratkan adanya keberpihakan kepada kepentingan kelompok masyarakat rentan. Pendekatan ini juga akan menempatkan kompetensi berupa pengetahuan lokal (*local knowledge*) dan keterampilan hidup (*life skill*) yang memomorsatukan keberadaan kelompok rentan sebagai bagian dari jenius lokal (*local geniuses*) di latar depan (Musthofa, dkk., 2017). Dalam prakteknya pendekatan ini akan mengakomodasi potensi dan modal sosial (*social capital*) kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, sebagai sumber daya dalam melaksanakan program penanggulangan bencana yang inklusif. Penyandang disabilitas, walaupun termasuk dalam kelompok rentan, memiliki hak dan pantas menjadi penggerak upaya pengurangan risiko bencana melalui pendekatan yang menyeluruh dan inklusif.

Hal yang diperlukan adalah bagaimana menyiapkan secara sungguh-sungguh agar penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan tanggap mengenai masalah, kebutuhan, potensi dan cara-cara dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi (Wibowo, dkk., 2017). Dalam konteks ini, diharapkan agar penyandang disabilitas tanggap dan sadar bahwa mereka hidup di daerah rawan bencana dan mempunyai kapasitas yang memadai dalam pengurangan resiko bencana. Proses ini, menghendaki adanya *political will* dari pemerintah untuk merencanakan dan melaksanakan program penanggulangan bencana yang mengakomodasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas guna mendorong berkembangnya kelompok masyarakat rentan yang sadar dan tanggap bencana (Probosiwi, 2013).

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka rumus masalah penelitian diarahkan untuk menjawab persoalan sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana modal sosial inklusif Difabel Siaga Bencana (Difagana) di Provinsi D.I.Yogyakarta? *Kedua*, mampukah penguatan modal sosial inklusif Difagana membawa perubahan positif bagi sistem manajemen bencana di DIY?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi modal sosial kelompok Difabel Siaga Bencana (Difagana) di Provinsi D.I.Yogyakarta serta mengetahui proses penguatan modal sosial inklusif Difagana yang diharapkan bisa mengakomodasi system manajemen bencana yang inklusif. Selain memberikan manfaat bagi pengembangan teori pemberdayaan masyarakat secara umum, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi pengembangan modal sosial terutama yang inklusif, guna mendukung eksistensi kelompok rentan di masyarakat dalam sistem manajemen bencana berbasis masyarakat.

2. Tinjauan Pustaka

Akomodasi Modal Sosial Difagana

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Sosial yang telah dilaksanakan di Kopenhagen 12 Maret 1995 menyentil kita dengan sebuah kosa kata yang seolah baru, "modal sosial". Jenis modal inilah yang selama ini luput dari pertimbangan penyelenggara pemerintahan yang umumnya terkesima bahkan terhanyut dalam ritus ideologisasi atas apa yang mereka percayai sebagai "pembangunan". Modal sosial tiba-tiba tampil menjadi kata kunci menanggapi tiga agenda pokok konferensi: mengurangi kemiskinan, menciptakan angkatan kerja produktif dan meningkatkan integrasi sosial (Hermawanti dan Rinandari, 2003).

Modal sosial telah teruji oleh sejarah sebagai mekanisme penting dalam upaya mencapai kesejahteraan rakyat. Modal sosial dipandang sebagai bumbu vital bagi perkembangan pemberdayaan masyarakat. Definisi yang dikemukakan oleh Fukuyama (2002) adalah definisi yang melihat modal sosial itu sebagai sesuatu *traits* (sifat) yang melekat (*embedded*) pada diri individu yang berupa tata nilai kehidupan dan aturan yang dianut dan dijalankan oleh individu dalam bekerjasama. Berdasarkan eksplorasi diatas maka komponen modal sosial terdapat dalam tiga tipologi yaitu:

- a. *Social Bonding* (Nilai, Kultur, Persepsi dan Tradisi)

Social bonding adalah tipe modal sosial dengan karakteristik adanya ikatan yang kuat (adanya perekat sosial) dalam suatu sistem kemasyarakatan. *Social bonding* cenderung bersifat eksklusif. Apa yang menjadi karakteristik dasar yang melekat pada

tipologi ini, sekaligus sebagai ciri khasnya, yaitu baik kelompok maupun anggota kelompok, dalam konteks ide, relasi dan perhatian, lebih berorientasi ke dalam (*inward looking*) dibandingkan berorientasi ke luar (*outward looking*). Ragam masyarakat yang menjadi anggota kelompok ini umumnya homogenius. Misal, seluruh anggota kelompok berasal dari suku yang sama. Mereka cenderung konservatif dan lebih mengutamakan *solidarity making* daripada hal-hal yang lebih nyata untuk membangun diri dan kelompok sesuai tuntutan nilai dan norma masyarakat (Hasbullah, 2006).

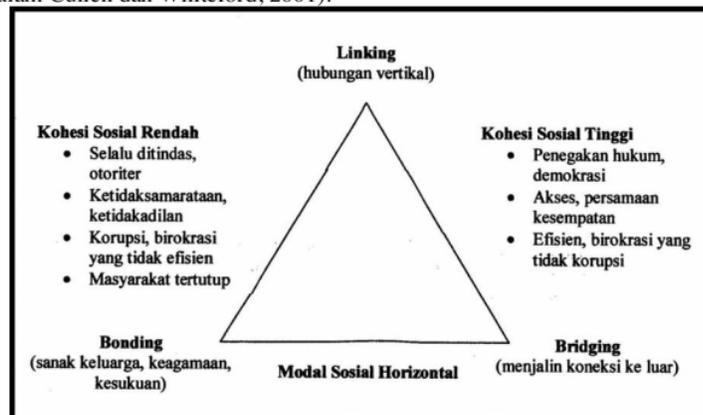
b. *Social Bridging* (bisa berupa institusi maupun mekanisme)

Social Bridging (jembatan sosial) merupakan suatu ikatan sosial yang timbul sebagai reaksi atas berbagai macam karakteristik kelompok, yang muncul karena berbagai kelemahan yang ada disekitarnya sehingga mereka memutuskan untuk membangun suatu kekuatan dari kelemahan yang ada. Bentuk modal sosial ini biasa disebut sebagai bentuk modern dari suatu pengelompokan, grup, jaringan, asosiasi atau masyarakat. Adanya sikap *outward looking* memungkinkan menjalin koneksi dan jaringan kerja yang saling menguntungkan dengan asosiasi atau kelompok di luar kelompoknya (Hasbullah, 2006). Wilayah *social bridging* lebih luas dari *social bonding* karena bekerja lintas kelompok masyarakat maupun kepentingan, sehingga keanggotaannya tidak hanya berbasis kelompok tertentu.

c. *Social Linking* (hubungan atau jaringan sosial)

Merupakan hubungan sosial yang dikarakteristikan dengan adanya hubungan di antara beberapa level dari kekuatan sosial maupun status sosial yang ada dalam masyarakat. *Social linking* merujuk pada sifat dan luas hubungan vertikal diantara kelompok orang yang mempunyai saluran terbuka untuk mengakses sumberdaya dan kekuasaan dengan siapa saja. Hubungan antara pemerintah dan komunitas termasuk dalam *social linking*. Sektor umum (seperti negara dan institusinya) adalah pusat kesejahteraan masyarakat (Cullen dan Whiteford, 2001).

Pada dasarnya ketiga tipe modal sosial ini dapat bekerja tergantung dari keadaannya. Kohesi atau penggabungan antara ketiga tipologi tersebut disajikan oleh Coletta pada gambar berikut (dalam Cullen dan Whiteford, 2001):



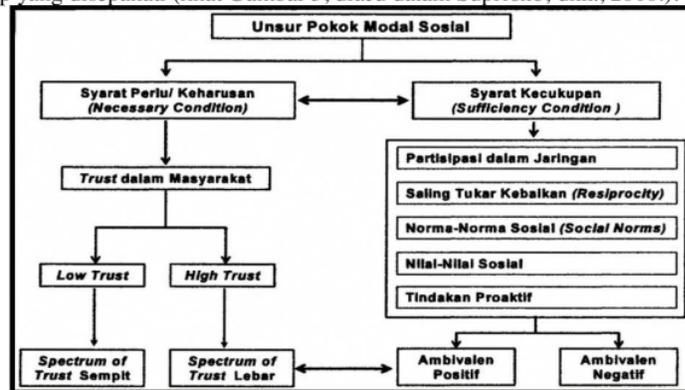
Sumber: Coletta, dalam Cullen dan Whiteford, 2001.

Gambar 2.1

Kohesi Sosial: Penggabungan dari Bonding, Bridging dan Linking, Social Capital

Berdasarkan ketiga tipologi tersebut inti telaah modal sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat dalam suatu entitas atau kelompok untuk bekerja sama membangun suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama tersebut diwarnai oleh suatu pola interrelasi yang timbal balik dan saling menguntungkan, dan dibangun di atas kepercayaan yang

ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat. Kekuatan tersebut akan maksimal jika didukung oleh semangat proaktif untuk menciptakan jalinan hubungan di atas prinsip-prinsip yang disepakati (lihat Gambar 3, diacu dalam Supriono, dkk., 2010:).



Sumber: Supriono et al., 2010

Gambar 2. 2

Unsur-unsur Pembentuk Modal Sosial

Di dalam proses penanggulangan bencana berbasis masyarakat sebenarnya dapat tercipta *social bonding*, *social bridging*, dan *social linking*. Akan tetapi hal tersebut dipengaruhi oleh frekuensi, fokus, niat, moralitas, dan *awareness* dari para pelakunya. Meskipun hubungan *social bonding* yang terjalin antara pemerintah dan kelompok masyarakat rentan cenderung lemah, namun jaringan sosial, solidaritas, kepercayaan, repositas yang terjalin di masyarakat secara umum menandakan adanya kapasitas individu untuk saling merangkul dan menumbuhkan nilai-nilai. Sehingga, mereka senantiasa dapat menciptakan modal sosial untuk bersama-sama melawan keterpinggiran.

Perubahan yang ingin dicapai melalui penguatan modal sosial adalah adanya partisipasi *self governing community*, menerima keberagaman, mandiri secara ekonomi, toleransi, penguatan otonomi, menemukan identitas asli dari masyarakat, menguatkan jaringan sosial, dan membangun keterampilan berdemokrasi. Antisipasi ke depan, atau dengan kata lain untuk mengatasi masalah ketidakberdayaan masyarakat, ditawarkan pendekatan melalui struktur atau lembaga mediasi (Hartono, 2010). Tujuannya adalah agar tercipta kembali demokrasi sosial dalam sistem penanggulangan bencana berbasis kelompok rentan di masyarakat. Oleh karena itu, manajemen penanggulangan bencana berbasis kelompok rentan di masyarakat harus dipahami sebagai upaya akomodasi modal sosial kelompok Difagana secara berkelanjutan.

Difabel Siaga Bencana: Akomodasi Kebutuhan dan Aspirasi Difabel

Difabel atau akronim dari *different ability* adalah orang yang memiliki perbedaan kemampuan. Istilah difabel pertama kali diperkenalkan oleh Mansoer Fakhri pada tahun 1996. Menurut Mansoer Fakhri kaum difabel bukanlah seseorang yang cacat tetapi yang memiliki kemampuan yang berbeda (Muhammadun, 2011). Disabilitas diartikan sebagai hasil dari interaksi antara orang dengan malfungsi organ tubuh, sikap, dan batasan lingkungan yang menghalangi mereka untuk secara penuh dan efektif berpartisipasi dalam masyarakat setara dengan orang lain. (Schranz, Ulmasova dan Silcock, 2009). Kemudian pengertian penyandang disabilitas dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Tabel 2.1
Kategori Penyandang Disabilitas dan Dasar Penggolongan

| No. | Nama Ahli/ Sumber | Dasar Kategori | Kategori Penyandang Disabilitas |
|-----|--|--|---|
| 1. | WHO | Pendekatan Medis | a. <i>Impairment</i> b. <i>Disability</i> c. <i>Handicap</i> |
| 2. | Peter Coleridge | Pendekatan Sosial | a. <i>Impairment</i> b. <i>Disability/Handicap</i> |
| 3. | Undang-undang No. 8 Tahun 2016 | Pendekatan Sosial | a. Penyandang Disabilitas Fisik b. Penyandang Disabilitas Intelektual c. Penyandang Disabilitas Mental d. Penyandang Disabilitas Sensorik |
| 4. | Manual RMB (Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat) | Pendekatan Medis, Sosial, Pendidikan, dan keterampilan | a. Gangguan Kejang b. Gangguan Belajar c. Gangguan Wicara d. Gangguan Pendengaran e. Gangguan Penglihatan f. Gangguan Gerak g. Gangguan Perkembangan h. Gangguan Tingkah Laku i. Gangguan Lain-Lain |

Sumber: Diolah dari WHO, Peter Coloridge (2007),
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Program RBM, (1997)

51 Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa fokus kajian penelitian ini mengambil kategori dari Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Bab 1 (Ketentuan Umum) Pasal 1 Ayat (7), yaitu tentang upaya pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan untuk menguatkan keberadaan mereka dalam pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri. Konsep penyandang disabilitas sebagai bagian dari manajemen bencana, tentu tidak lepas dari pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, serta keberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sering sekali terabaikan karena dianggap tidak memiliki keterampilan hidup (*life skill*), sehingga menyebabkan mereka kurang memiliki kesadaran dan pemahaman terhadap kebencanaan serta bagaimana cara mengatasi.

Difabel Siaga Bencana (Difagana) dibentuk pertama kali di DIY pada akhir tahun 2016. Difagana DIY berada di bawah koordinasi Dinas Sosial Provinsi D.I.Yogyakarta, serta dilatih langsung oleh Tagana, LSM dan PMI. Difagana dibentuk guna mengakomodasi kerelawanan sosial dan kebutuhan dari penyandang disabilitas yang selama ini dianggap menjadi beban dan diabaikan dalam sistem kesiapsiagaan bencana. Anggota Difagana mendapat berbagai pelatihan tentang pembinaan karakter, pengurangan resiko dan simulasi bencana, sistem dapur umum, hingga kemampuan medis (P3K). Pada tahun 2018, Difagana DIY turut bergabung dengan relawan lain dalam penanganan bencana gempa bumi di Lombok, Palu dan Donggala, serta bencana tsunami di Banten dan Lampung.

Melalui keberadaan Difagana sebagai kelompok rentan yang tergabung dalam Sahabat Tagana, proses penanggulangan bencana diharapkan bisa dilaksanakan secara berkesinambungan antar waktu, antar generasi dan antar kalangan sehingga lebih inklusif. Sistem penanggulangan bencana yang mengakomodasi modal sosial inklusif penyandang disabilitas, dipahami sebagai upaya meningkatkan kapasitas masyarakat rentan agar mampu menolong diri sendiri dan kelompoknya dalam mengurangi resiko bencana yang berpotensi menjadi bencana di sekitar kehidupannya. Kekhususan dan kompleksitas yang dimiliki masing-masing kriteria disabilitas membuat penanganan dan kebutuhan Difagana dalam sistem manajemen bencana harus spesifik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif secara holistik dan dengan cara deskriptif (Moleong, 2010). Melalui metode kualitatif deskriptif peneliti akan menggambarkan secara cermat mungkin fenomena sosial yang diteliti. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menggambarkan secara tepat sifat-sifat fenomena sosial tertentu serta memahami adanya hubungan atau pengaruh antara fenomena sosial satu dengan fenomena lain. Sehingga penelitian ini lebih menekankan pada pendeskripsian pada hal-hal yang bersifat spesifik yang disoroti dari sudut ke “mengapa” dan “kebagaimanaannya” tentang sesuatu yang terjadi (Mukhtar dan Widodo, 2000).

Peneliti ini tidak hanya menjelaskan secara deskriptif tetapi juga mengeksplorasi data yang ditemukan untuk memberikan gambaran atau penegasan pada konsep atau gejala yang ditemukan. Penelitian ini berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subyek yang diteliti, memahami dan mengerti bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari (Bogdan dan Taylor, 1992). Pada posisi ini, peneliti berusaha menggali sejauh mana akomodasi modal sosial inklusif Difagana dalam proses penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Informan kunci pada penelitian ini adalah penyandang disabilitas di DIY yang tergabung dalam organisasi Difagana.

Data penelitian terdiri atas data primer berupa tempat dan peristiwa yang terkait dengan modal sosial Difagana yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) secara bertahap (Sugiyono, 2010). Wawancara dilakukan dengan Pengurus dan Anggota Difagana DIY, Dinas Sosial DIY sebagai koordinator, dan Tagana (Taruna Siaga Bencana) yang dipilih secara purposif terkait manajemen penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Provinsi D.I.Yogyakarta. Data sekunder berasal dari kajian literatur, yakni: jurnal publikasi tentang penyandang disabilitas dan bencana, buku referensi terkait modal sosial, Dokumen Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Sarana Kesejahteraan Sosial DIY Tahun 2017, buku kebencanaan, dan sumber referensi terkait manajemen bencana dari media elektronik Nasional.

Data primer dan sekunder dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif data menurut Miles dan Heberman (Bogdan dan Taylor, 1992), melalui tahapan: reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan *data display*, dan *conclusion*. Uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi (Moleong, 2010) dengan mengecek kembali antara hasil analisis data wawancara, observasi, dokumentasi dan FGD agar bisa saling mendukung dan menguatkan. Akomodasi modal sosial inklusif Difagana diarahkan pada tercapainya tujuan ekonomi, sosial dan ekologi dalam upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan bencana berbasis masyarakat. Kriteria analisis modal sosial yang digunakan dalam metode ini terdiri dari 8 (delapan) dimensi kriteria, yakni: partisipasi, norma dan aturan, sikap saling percaya, saling tukar kebaikan, kohesifitas sosial, akses informasi dan komunikasi, tindakan proaktif dan jaringan sosial.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akomodasi Modal Sosial Inklusif Difabel Siaga Bencana (Difagana)

Suatu masyarakat yang memiliki modal sosial rendah, kualitas pembangunan manusianya akan jauh tertinggal. Beberapa dimensi pembangunan manusia yang sangat dipengaruhi oleh modal sosial antara lain kemampuannya menyelesaikan berbagai masalah kolektif, mendorong roda perubahan yang cepat di tengah masyarakat, memperluas kesadaran bersama bahwa banyak jalan yang bisa dilakukan oleh setiap anggota kelompok untuk memperbaiki nasib secara bersama-sama, memperbaiki mutu kehidupan seperti meningkatkan kesejahteraan, perkembangan anak dan banyak keuntungan lainnya yang dapat diperoleh. Bangsa yang memiliki modal sosial tinggi akan cenderung lebih efisien dan efektif menjalankan berbagai kebijakan untuk menyejahterakan, memajukan rakyat, menanggulangi permasalahan sosial warga negaranya, terutama kemiskinan.

Akomodasi modal sosial inklusif Difagana dilakukan untuk mengidentifikasi nilai, institusi, dan mekanisme yang mendasari interaksi antar penyandang disabilitas dan berkontribusi dalam sistem manajemen bencana di D.I.Yogyakarta yang berlandaskan pada partisipasi, norma dan aturan, sikap saling percaya, saling tukar kebaikan, kohesifitas sosial, akses informasi dan komunikasi, tindakan proaktif serta jaringan sosial.

a. Partisipasi Difagana

Difagana DIY menginginkan pengurus dan anggota-anggotanya untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan manajemen bencana. Di dalam organisasi Difagana tidak ada divisi yang khusus merancang atau merencanakan sebuah program karena mereka masih berada dalam “satu komando” dari Dinas Sosial DIY dan Tagana. Semua program yang ada di Difagana turun dari atas sehingga terkadang anggota Difagana menganggap bahwa program tersebut kurang sesuai dengan kebutuhan dan masih sarat kepentingan.

Tidak adanya divisi yang khusus merancang program seharusnya membuat proses perencanaan di Difagana menjadi sangat partisipatif, namun karena terkendala “satu komando” maka kemampuan Difagana dalam menyusun program kerja atau kegiatan secara mandiri menjadi terbatas. Program yang dijalankan terkadang kurang tepat bagi beberapa kriteria penyandang disabilitas karena Dinas Sosial DIY sebagai pemegang kebijakan belum tentu mengerti hambatan yang dialami oleh masing-masing disabilitas, padahal setiap analisis kebutuhan harus disesuaikan dengan kekhususan dan kompleksitas yang dimiliki kriteria disabilitas.

Partisipasi anggota Difagana masih belum optimal (baru 20% dari jumlah anggota seluruhnya) karena mobilitas anggota dari rumah menuju ke Posko Tagana DIY terhambat oleh keterbatasan sarana transportasi karena jarak yang jauh. Meski demikian, keberadaan Difagana menjadikan penyandang disabilitas yang memiliki mobilitas tinggi menjadi semakin aktif, sehingga bisa berperan langsung dalam melakukan perubahan. Seorang anggota Difagana dapat memilih untuk berpartisipasi aktif maupun tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Namun, apabila telah memutuskan untuk berpartisipasi maka anggota Difagana tersebut harus berkomitmen terhadap keseluruhan proses kegiatan.

Menyadari bahwa kompleksitas yang dimiliki masing-masing kriteria disabilitas berbeda dan setiap individu memiliki potensi yang tidak sama, maka penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih salah satu penguasaan tugas yang sesuai dengan kebutuhannya. Adi (2007: 72) memaparkan bahwa *kebutuhan bersifat relatif dan masyarakat juga dinamis, sehingga human service organization dituntut untuk selalu memperbaharui atau mengkaji ulang kebutuhan dari komunitas yang berada di wilayah kerja mereka. Hal ini dikarenakan seiring berjalannya waktu dan perubahan lingkungan sosial (kondisi sosial ekonomi) maka perubahan kebutuhan dalam sebuah kelompok masyarakat dapat terjadi.*

Dalam organisasi DIFAGANA, belum ada divisi khusus yang bertugas mengevaluasi atau memonitor jalannya program. Tidak adanya divisi yang melakukan evaluasi justru memberikan kesempatan pembelajaran yang sangat luas bagi anggota Difagana. Dengan melakukan evaluasi secara mandiri, penyandang disabilitas akan belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Hasil pembelajaran ini akan meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka dalam menangani masalah serta mengambil keputusan. Hasil dari keseluruhan proses tersebut adalah peningkatan keberdayaan penyandang disabilitas.

b. Norma dan Aturan

Ada aturan dan norma yang berlaku di Difagana. Adapun prinsip prinsip organisasi Difagana adalah sebagai berikut:

- 1) Difagana adalah organisasi penyandang disabilitas yang bergerak dalam bidang penanggulangan dan kesiapsiagaan bencana. Sebagai organisasi relawan kebencanaan, Difagana berfungsi melakukan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas agar memiliki akses dalam sistem manajemen bencana, keterampilan kesiapsiagaan bencana dan pengetahuan terhadap adaptasi mitigasi bencana. Sebagai organisasi relawan kebencanaan Difagana aktif berjuang menjadi agen perubahan dalam sistem manajemen bencana berbasis pemberdayaan kelompok rentan (penyandang disabilitas).

- 2) Difagana memiliki prinsip bahwa penyandang disabilitas adalah setara dengan warga negara lainnya yang tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif. Oleh karena itu, Difagana memperjuangkan kesamaan hak, kesamaan kesempatan dan partisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat, kesempatan memperoleh akses dalam sebuah sistem manajemen bencana, serta menegakan citra, martabat, dan meluruskan persepsi keliru tentang penyandang disabilitas.
- 3) Difagana bukanlah organisasi yang eksklusif, sehingga dalam melaksanakan program senantiasa bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, LSM, organisasi sosial baik penyandang disabilitas maupun non-penyandang disabilitas, organisasi profesi, serta lembaga-lembaga dana.
- 4) Dalam kegiatan yang memberikan manfaat secara luas kepada semua golongan penyandang disabilitas dari berbagai usia dan karakteristik disabilitas, penyandang disabilitas selalu tampil menjadi ujung tombak kegiatan.

Selain prinsip-prinsip tersebut, Difagana juga memiliki norma-norma tidak tertulis. Lawang (2005) menjelaskan bahwa norma merupakan standar tentang apa yang dipandang benar atau pantas. Norma mengandung gagasan tentang kewajiban dan keharusan. Ada nilai yang terkandung dalam struktur sosial itu yang dilindungi oleh norma. Diantara norma dalam Difagana adalah tidak mengambil keuntungan dari penyandang disabilitas yang diberdayakan, seorang penyandang disabilitas diperbolehkan aktif pada organisasi lain di luar Difagana, seorang pengurus harus menyelesaikan tugasnya dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diamanahkan kepada dirinya, serta harus sensitif terhadap kekhususan dan kompleksitas yang dimiliki masing-masing kriteria disabilitas, serta menyadari bahwa mereka memiliki kebutuhan dan keterbatasan yang berbeda.

c. Sikap Saling Percaya

Sikap saling percaya yang timbul antar anggota Difagana DIY sangat tinggi. Penyandang disabilitas mendapatkan keuntungan dengan adanya hubungan tersebut. Penyandang disabilitas menjadikan Difagana sebagai tempat mengadu dan berkeluh kesah. Mereka saling membantu dan mendapat dukungan di saat kritis. Jika ada anggota yang berada dalam masalah, terutama yang berkaitan dengan disabilitasnya, maka anggota lain turut memberikan dukungan. Mereka saling memotivasi karena merasa memiliki suatu komunitas yang dapat menjadi tempat mengaktualisasikan diri. Rasa percaya tersebut juga semakin diperkuat karena mereka saling berbagi informasi apabila ada program barulowongan pekerjaan, pembagian alat bantu dan lainnya. Adanya rasa percaya, rasa kekeluargaan, dan sosok yang menjadi pemersatu membuat Difagana DIY menjadi komunitas penyandang disabilitas yang di dalamnya terdapat hubungan interpersonal yang kuat. Hal ini menjadikan ikatan yang ada di dalam Difagana DIY sangat kuat.

d. Saling Tukar Kebaikan

Sebagian besar anggota Difagana DIY selalu ikut serta dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat secara sukarela. Umumnya, kegiatan kolektif yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan program kerelawanan sosial. Selain itu di masyarakat mereka juga turut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan agama (tahlilan, pernikahan, penguburan, pengajian, dll.), gugur desa maupun lingkungan, membangun sarana umum, siskamling, posyandu dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat sosial. Bila ada anggota yang tidak berpartisipasi, tidak pernah ada kritik atau sanksi terhadap yang bersangkutan.

Aksi-aksi kolektif dan kerjasama yang terjalin di Difagana sangat ditentukan oleh kesadaran pribadi anggotanya. Keterlibatan aktif dalam program-program penanggulangan bencana pun dilakukan untuk kepentingan bersama. Demikian pula jika ada anggota yang mendapat musibah, maka secara otomatis sebagian besar akan membantu. Dengan demikian, dalam hal aksi kolektif, resiprositas dan semangat *altruism*, kesadaran individual di komunitas Difagana tergolong tinggi. Berbagai problem sosial yang terjadi di dalam internal Difagana dapat diminimalkan sehingga penyandang disabilitas lebih mudah membangun diri, kelompok, lingkungan sosial serta fisik mereka secara mengagumkan. Hal ini dikarenakan penyandang disabilitas anggota Difagana sudah memiliki sikap dan orientasi nilai yang relatif terbuka,

sehingga resiprositas yang kuat akan memberikan dampak positif yang luas, baik untuk lingkungan sosial sendiri maupun untuk kelompok di luar lingkungannya.

e. Kohesifitas Sosial

Salah satu tujuan dari pembentukan Difagana adalah memupuk rasa kekeluargaan antar penyandang disabilitas. Hal ini berpotensi menciptakan kohesifitas sosial antar anggota Difagana. Berdasarkan hasil penelitian, ikatan tersebut bukan sekedar bersifat administratif. Difagana bukan sekedar menjadi organisasi dengan fungsi-fungsi tertentu sesuai jabatan dan tugas masing-masing individu, akan tetapi hubungan antar anggotanya bersifat emosional dan bersifat timbal balik yang melahirkan suatu kepercayaan. Sosok Ketua Difagana DIY yang sangat disegani oleh para anggotanya juga memberikan pengaruh pada ikatan emosional tersebut. Ketua Difagana DIY tersebut menunjukkan komitmen untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Perjuangan Ketua Difagana DIY tersebut sangat dihargai dan dipercaya oleh penyandang disabilitas. Beberapa anggota Difagana bahkan merasa bahwa Ketua Difagana DIY sudah seperti ibunya sendiri karena merasa ada ikatan sosial yang kuat.

f. Akses Informasi dan Komunikasi

Penyandang disabilitas memiliki kebutuhan khusus dalam menjalani kehidupan sehari-hari, juga dalam mengakses teknologi, informasi dan komunikasi. Informasi kini menjadi kebutuhan yang diperlukan penyandang disabilitas terutama bagi mereka yang ingin mengembangkan diri (Utami, 2015: 45). Penyandang disabilitas yang tergabung dalam Difagana DIY sendiri memiliki grup *social media* yang bisa memberikan akses informasi dan komunikasi antar anggota tentang setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh Difagana. Penyampaian informasi melalui grup tersebut dilakukan menggunakan “teks” maupun “audio”, sehingga kebutuhan informasi bagi seluruh penyandang disabilitas bisa terpenuhi. Bagi penyandang disabilitas netra bisa langsung mendengarkan penyampaian informasi berupa “audio”, atau “teks” bagi penyandang tuna rungu, yang memudahkan penyandang disabilitas menerima dan memahami isi informasi tersebut. Sedangkan di dalam komunikasi sehari-hari, anggota Difagana selalu berusaha menyesuaikan kebutuhan dari masing-masing rekan disabilitas. Meski tidak mudah, namun harapannya keseluruhan informasi bisa tersampaikan dengan baik kepada seluruh anggota Difagana yang memiliki karakteristik disabilitas yang berbeda-beda.

g. Tindakan Proaktif

Penyandang disabilitas yang tergabung dalam Difagana DIY sudah mulai mampu mengambil keputusan sendiri dalam kehidupannya, bahkan juga dalam menentukan keputusan yang akan mengubah kehidupan mereka. Sebagian besar dari mereka sudah merasa cukup bahagia dengan kondisinya saat ini, meskipun terkadang masih banyaknya diskriminasi yang mereka dapatkan. Tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas relatif mulai tinggi, tidak hanya sebatas memberikan suara pada pemilu, pilpres dan pilkada. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya usulan kolektif dari anggota Difagana dalam berbagai forum di masyarakat, sebagai upaya mendukung program pembangunan dan penanggulangan bencana. Anggota Difagana pun selalu dilibatkan dalam forum-forum manajemen bencana di level pemerintah, sehingga dengan begitu proses pelaksanaan program penanggulangan bencana di masyarakat dirasa lebih transparan dan bisa menciptakan tindakan proaktif dari penyandang disabilitas sebagai bagian dari kelompok rentan di masyarakat.

h. Jaringan Sosial Difagana

Selain menjadi Sahabat Tagana dan berada di bawah binaan Dinas Sosial DIY, salah satu strategi Difagana dalam memperluas jaringan adalah menjalin kerjasama dengan mitra kerja dari organisasi penyandang disabilitas lainnya, LSM, organisasi masyarakat, dunia usaha dan lainnya. Hal ini berpotensi menciptakan jaringan antara organisasi sosial lainnya, dan menciptakan jaringan dengan pemegang kekuasaan yang lebih tinggi. Hubungan antar anggota Difagana (*bonding capital*) adalah saling mempercayai. Rasa kekeluargaan antar anggota Difagana juga sangat tinggi. Bentuk kekeluargaan antara anggota Difagana juga tidak terlepas dari keberadaan Ketua Difagana DIY yang menjadi sosok yang dihargai dan dihormati oleh anggotanya. Kepedulian Ketua Difagana DIY terhadap masalah penyandang disabilitas dan sosoknya yang mandiri telah menjadikannya sebagai sosok yang mengikat kesatuan Difagana itu

sendiri. Hal ini membuat sosok Ketua Difagana tidak sekedar menjadi pemimpin, namun juga menjadi pemimpin yang membangkitkan motivasi dari para penyandang disabilitas agar selalu aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan.

Difagana juga menjalin hubungan dengan berbagai lembaga (*bridging capital*). Adapun beberapa lembaga yang menjadi mitra Difagana adalah sebagai berikut: Sigap, Cikal, Sabda, Griya Manunggal, Ohana, dll. Selain membina hubungan baik, Difagana juga melakukan aksi bersama terutama yang berkenaan dengan manajemen penanggulangan dan kesiapsiagaan bencana. Jaringan antara Difagana dengan lembaga pemerintah (*linking capital*) terjadi karena Difagana DIY yang merupakan Sahabat Tagana merupakan organisasi yang dibentuk dan dibina secara langsung oleh Dinas Sosial DIY, sehingga keseluruhan program yang akan dijalankan oleh Difagana harus sepengetahuan dan seijin Dinas Sosial DIY.

Tabel 4.1
Beberapa Komponen Modal Sosial Inklusif Difagana Diy

| Komponen Model Pemberdayaan Kelompok Rentan | Difagana DIY |
|---|---|
| Kegiatan utama yang menonjol | Peningkatan keberdayaan penyandang disabilitas dalam sistem manajemen bencana |
| Sebaran kelompok yang dijadikan sasaran | Tuna Daksa Tuna Netra Tuna Rungu/Wicara |
| Program pendukung ✓ Aksesibilitas Kelembagaan ✓ Peningkatan Pengetahuan ✓ Peningkatan Keterampilan | Relatif memadai ✓ Relatif Kurang ✓ Perlu ditingkatkan ✓ Relatif berhasil |
| Program peningkatan partisipasi | Relatif besar dan cukup beragam |
| Intensitas dan keberlanjutan fasilitasi | Relatif intensif dan tampak berlanjut |
| Kepemimpinan organisasi | Relatif kuat |
| Solidaritas dan kohesifitas sosial | Cukup kuat dan berkembang |
| Manajemen dan keorganisasian | Relatif kuat dan berkembang sehat |
| Kepercayaan diri dan kemandirian | Relatif tinggi dan cukup berkembang |
| Penyelenggaraan program | Relatif baik dan mulai diterima masyarakat |
| Penguatan modal sosial | Relatif besar |

Sumber: hasil analisis penulis, 2019

Penguatan Modal Sosial Inklusif Difagana: Melindungi Masyarakat dari Kerentanan

Penguatan modal sosial merupakan mekanisme tanggung jawab muncul dari diri internal warga, bukan karena dorongan maupun paksaan pemerintah melalui perangkat keras berupa regulasi. Hal ini juga menjadi *soft campaign* bagi upaya menumbuhkembangkan energi sosial di masyarakat yang nantinya dapat menggerakkan dinamika dan proses penanggulangan bencana secara mandiri. Penguatan modal sosial inklusif dapat berkontribusi secara signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan bencana, baik itu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat maupun pemulihan pasca bencana. Berikut akan dipaparkan beberapa hal yang dapat meyakinkan khalayak bahwa penguatan modal sosial inklusif benar-benar dapat melindungi masyarakat dari kerentanan yang terjadi akibat adanya bencana.

Pertama, di tingkat individu, modal sosial inklusif bisa mendekatkan antara kelompok rentan, warga masyarakat dan pengambil kebijakan. Hubungan di antara kelompok masyarakat rentan dan warga masyarakat memungkinkan adanya kolaborasi sosial untuk menyalurkan aspirasi mereka. Perencanaan program-program penanggulangan bencana harus berbasis pada kekhususan dan kompleksitas kriteria disabilitas, sehingga pemberdayaan bagi kelompok rentan di masyarakat bisa dirintis dan diwujudkan secara nyata.

Kedua, di tataran antarindividu (/kelompok masyarakat), dimungkinkan adanya upaya membangun jejaring kerjasama secara kolektif untuk diseminasi informasi dalam pengambilan

keputusan. Lembaga-lembaga yang berada di level daerah bisa menjalin kerjasama dengan komunitas-komunitas kelompok rentan di masyarakat, sehingga mereka benar-benar bisa membuka peluang ketelibatan dalam proses pengambilan keputusan, melepaskan diri dari dominasi elit, mendorong adanya stimulasi internal dalam proses institusionalisasi yang berdampak pada pengembangan kapasitas secara berkelanjutan, serta agar kelompok rentan di masyarakat bisa mengidentifikasi kelemahan, kelebihan, peluang maupun hambatan dalam dirinya.

Modal sosial dapat bekerja sebagai sebuah mekanisme operasional yang berkontribusi secara langsung terhadap upaya mengentaskan kemiskinan. Hal ini dapat dipahami menggunakan kerangka modal sosial yang dikembangkan Woolcock (2001), terdapat tiga hal yang bisa dipaparkan beserta contoh teknisnya. Pertama, *social bonding*. Dalam kerangka ini, modal sosial dikembangkan dengan karakteristik keterikatan yang kuat di dalam kelompok. Misalnya, terkait soal kekerabatan. Di organisasi Difagana, ikatan kekerabatan antar kriteria penyandang disabilitas masih terus dibawa.

Ikatan-ikatan tersebut tidak boleh dimaknai secara negatif terkait semangat eksklusivitas berdasarkan kriteria disabilitas, melainkan harus dipahami sebagai kultur warga masyarakat kita. Modal sosial itulah yang harus dipupuk untuk tujuan mewujudkan masyarakat madani. Kelompok-kelompok disabilitas dengan latar belakang kekhususan dan kompleksitas kriteria disabilitas yang sama mempunyai rasa empati dan kebersamaan yang luar biasa. Di antara mereka timbul rasa saling menyayangi, saling percaya, dan saling berkewajiban satu sama lain. Mekanisme semacam ini menghasilkan tata nilai keteraturan di dalam masyarakat (*social order*). Nilai-nilai tersebut bisa dijadikan sebagai pintu masuk untuk memupuk rasa kebersamaan antar penyandang disabilitas dalam mengatasi berbagai persoalan yang timbul. Jika ada anggota tertimpa musibah, misalnya sang anak mengalami kecelakaan, maka anggota kelompok lain akan saling mengingatkan dan menanamkan kesadaran untuk saling membantu.

Kedua, *social bridging*. Dalam kerangka ini, terdapat relasi antar kelompok yang lebih luas dibanding kerangka *social bonding*. Terdapat jembatan sosial yang menghubungkan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Perluasan relasi antarkelompok ini bukan terjadi dengan sendirinya, melainkan berangkat dari kesadaran untuk membentuk kelompok yang lebih luas sebagai refleksi dari kelemahan yang ada pada kelompok sebelumnya yang lebih sempit. Bentuk modal sosial ini juga biasa disebut bentuk modern dari suatu pengelompokan, grup, jaringan, asosiasi atau masyarakat. Modal utama dari ketercapaiannya adalah melalui interaksi sosial. Dengan demikian institusi sosial tetap eksis sebagai tempat artikulasi kepentingan masyarakat, sehingga memungkinkan adanya diseminasi informasi yang lebih kuat, terakar dan cepat.

Social Bridging bisa juga dilihat dengan adanya keterlibatan umum penyandang disabilitas sebagai warga negara. Jika pemerintah ingin menyusun program penanggulangan bencana yang inklusif maka penyandang disabilitas harus dilibatkan. Untuk diseminasi informasi dalam mengatasi berbagai persoalan penanggulangan bencana juga lebih mudah dilakukan karena modal sosial sudah berjalan dengan struktur yang rapi dan kuat. Proses integrasi sosial di dalam kerangka ini memudahkan perwujudan cita-cita bersama dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan konsep sistem manajemen bencana yang selama ini bias.

Ketiga, *social linking*. Dalam kerangka ini, relasi di dalam masyarakat sudah diartikan secara jauh lebih luas. Relasi dalam mekanisme ini melibatkan satu kekuatan sosial dengan kekuatan sosial lainnya. *Social linking* merujuk pada sifat dan luas hubungan vertikal antara Difagana yang mempunyai saluran terbuka untuk mengakses sumberdaya dan kekuasaan dengan siapa saja. Hubungan antara pembuat kebijakan (Dinas Sosial) dengan Difagana termasuk di dalam *social linking*. Sektor umum (seperti negara dan institusinya) adalah pusat untuk kegunaan dan kesejahteraan masyarakat (Cullen dan Whiteford, 2001). Negara maupun di pemerintahan dipandang khalayak sebagai tokoh, dan mempunyai status sosial dari pada masyarakat kebanyakan. Namun, di antara elemen-elemen tersebut terdapat satu kepentingan sekaligus kebutuhan tertentu untuk menjalin hubungan yang saling menguntungkan.

Dalam konteks ini, Dinas Sosial DIY sebagai pengambil kebijakan membangun relasi dengan kelompok penyandang disabilitas terkait sistem manajemen bencana berbasis masyarakat.

Kepentingan penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan di masyarakat adalah mendapatkan pengakuan dan peningkatan kemandirian melalui program-program yang digulirkan oleh Dinas Sosial, sedangkan kepentingan Dinas Sosial adalah meraup kesuksesan dari program-program yang digulirkan melalui Difagana. Dua kepentingan tersebut bisa berpadu dalam sebuah modal sosial yang kuat jika benar-benar didayagunakan. Hanya masyarakat yang memiliki modal sosial kuat yang dapat mendukung pengembangan potensi ekonomi, sosial dan ekologi (Zubaedi, 2007) yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata (Soetomo, 2011).

Dengan adanya penguatan modal sosial diharapkan Difagana bisa menumbuhkembangkan energi sosial yang dapat menggerakkan dinamika dan proses penanggulangan bencana secara mandiri. Kini tinggal bagaimana seluruh stakeholder yang ada, mulai dari pemerintah, swasta, kelompok masyarakat, warga, hingga civitas akademika, bergandengan tangan dan berkolaborasi memupuk modal sosial yang telah ada untuk mewujudkan perbaikan dan penyempurnaan implementasi sistem manajemen bencana berbasis masyarakat. Terlebih apabila dengan perbaikan dan penyempurnaan tersebut dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mengurangi resiko bencana karena keberhasilan program manajemen bencana pada hakekatnya ditentukan oleh sejauh mana kebijakan yang diformulasikan mendapatkan dukungan dari warga masyarakat. Sebagus apapun program disusun, jika tidak memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, pada akhirnya akan berakibat pada kegagalan program dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Suparjan dan Hempri Suyatna, 2003).

5. KESIMPULAN

Keberadaan Difagana DIY yang secara umum dinilai berhasil membuka eksklusivitas sistem manajemen bencana, ternyata masih menyisakan berbagai persoalan. Setidaknya ada tiga permasalahan utama yang memberikan kontribusi terhadap ketidakberhasilan Pemerintah dalam merumuskan kebijakan sistem manajemen bencana yang benar-benar inklusif, yaitu:

1. Terbentuknya Difagana DIY ini ternyata masih belum mengakomodasi seluruh kriteria disabilitas dari sistem yang telah mereka bangun. Perubahan atau pengelolaan struktur yang diciptakan oleh pemerintah tersebut ternyata masih berfokus pada pemenuhan hasil dibanding pemenuhan kebutuhan masing-masing kriteria disabilitas sebagai kelompok rentan di masyarakat.
2. Proses institusionalisasi yang dicoba diterapkan tidak cocok dengan perencanaan di level pemerintah paling bawah. Ketidacocokan bukan pada proses dan sistem perencanaan yang dikembangkan tetapi lebih kepada "aktor" yang memfasilitasi. Belum optimalnya peran pemerintah dalam mengangkat peran kelompok rentan yang notabeneanya merupakan sasaran utama program penanggulangan bencana mengakibatkan prinsip keberpihakan yang ada belum dapat dilakukan secara optimal.
3. Pemanfaatan modal sosial penyandang disabilitas yang merupakan nilai-nilai dan hubungan-hubungan sosial yang mengakar dalam struktur masyarakat dinilai belum optimal. Sehingga penyandang disabilitas belum dapat mengkoordinir tindakan untuk mencapai tujuan secara maksimal dalam proses institusionalisasi yang berdampak pada pengembangan kapasitas kelompok masyarakat rentan yang berkelanjutan. Tingginya kualitas penyandang disabilitas yang tergabung dalam Difagana DIY tidak cukup jika hanya dilandaskan pada pemberian bantuan material (*charity based approach*) berdasar semangat belas kasihan, tapi juga sangat ditentukan oleh pendekatan hak asasi manusia yang mengakomodasi kekuatan modal sosial penyandang disabilitas (*human rights based approach*).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Febriana, dkk. (2015). *Kesiapsiagaan Masyarakat Desa Siaga Bencana Dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi di Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh*. Jurnal Ilmu Kebencanaan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 2, Nomor 3, Halaman 41-49.
- [2] Lestari, Puji, Agung Prabowo dan Arif Wibawa. (2012) Manajemen Komunikasi Bencana Merapi 2010 pada saat Tanggap Darurat. Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 10, Nomor 2, Agustus 2012, Halaman 173-197.
- [3] BAPPEDA DIY. (2017). Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Sarana Kesejahteraan Sosial Provinsi DIY Tahun 2017.
- [4] United Nations. (2012). *Disability, Natural Disasters and Emergency Situations*. Diunduh dari <http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1546>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2018.
- [5] Musthofa, Zainal Aliyy. (2017). Mengurai Sengkarut Bencana Lingkungan (Refleksi Jurnalisme Lingkungan dan Deep Ecology di Indonesia). Malang: UMM Press.
- [6] Wibowo, Faisal Grahadi. (2017). Identifikasi Potensi, Kebutuhan, dan Permasalahan Berdasarkan Hubungan Interaksi Masyarakat Dengan Lingkungannya yang Rentan Terhadap Bencana Longsor. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jilid 18, Nomor 2, Oktober 2017, Halaman 95-112.
- [7] Probosiwi, R. (2013). *Keterlibatan Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana*. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta, Kementerian Sosial RI.
- [8] Hermawanti, Mefi dan Hesti Rinandari. (2003). Modul Pemberdayaan Masyarakat Adat: Penguatan dan Pengembangan Modal Sosial Masyarakat Adat. Yogyakarta: IRE.
- [9] Fukuyama, Francis. (2002). *The Great Disruption*. Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- [10] Hasbullah, J. (2006). *Social Capital : Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. Jakarta: MR-United Press.
- [11] Cullen, Michelle, dan Whiteford. (2001). The Interrelations of Social Capital with Health and Mental Health. Makalah ini Disajikan dalam Discussion of Mental Health and Special Programs Branch Commonwealth Department of Health and Aged Care. Canberra: The Commonwealth Australia.
- [12] Supriono, Agus, dkk. (2010). Modal Sosial: Unsur-Unsur Pembentuk. Diunduh Dari <http://www.p2dtk.bappenas.go.id/artikel-15-unsurunsur-pembentuk.html>, diakses pada Tanggal 27 Desember 2018.
- [13] Hartono, Rudi. (2010). Pengaruh dan Wujud Pengembangan Modal Sosial untuk Meciptakan Sistem Politik yang Dinamis. Diunduh dari <http://masroed.wordpress.com/2010/05/26/pengaruh-dan-wujud-pengembangan-modal-sosial-untuk-menciptakan-sistem-politik-yang-dinamis/>, diakses pada tanggal 27 Desember 2018.
- [14] Muhammadun, A.S. (2011). Difabel dan Konstruksi Ketidakadilan Sosial. Diunduh dari <http://www.budisansblog.blogspot.com/2011/12/difabel-dan-konstruksiketidakadilan.html>, diakses pada tanggal 22 Desember 2018.
- [15] Schranz, B., Ulmasova, I., dan Silcock, N. (2009). *Mainstreaming Disability Into Disaster Risk Reduction: A Training*.
- [16] Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- [17] WHO. Disabilities. Diunduh dari <http://www.who.int/disabilities/en/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2018.
- [18] Peter Coloridge. 2007. *Pembebasan dan Pembangunan Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [19] Moleong, Lexy. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan 13*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- [20] Mukhtar dan Widodo E. (2000). *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta: Avyrouz.
- [21] Bogdan, Robert dan Steven J Taylor. (1992). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.

- 47
- [22] Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [23] Adi, Isbandi Rukminto. (2007). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial (Pengantar pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan)*. Depok: FISIP UI PRESS.
- [24] Lawang, Robert M.Z. (2005). *Modal Sosial dalam Perspektif Sosiologik: Suatu Pengantar*. Depok: FISIP UI Press.
- [25] Utami, Nadia Wasta. (2015). *Gelap dalam Gemerlap: Gelapnya Akses Informasi Bagi Difabel dalam Gemerlap Era Digitalisasi*. Jurnal Channel, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2015, Halaman 41-49.
- [26] Woolcock, Michael. 2002. "Social Capital Theory and Practice" in *Social Capital and Poverty Reduction which role for civil society organizations and the state?*. UNESCO.
- [27] Zubaedi. (2007). *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Ar-Ruzz media.
- 26
- [28] Soetomo. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [29] Suparjan dan Hempri Suyatna, (2003). *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.

Akomodasi Modal Sosial Inklusif Difabel Siaga Bencana (Difagana) Dalam Sistem Manajemen Bencana Berbasis Masyarakat di D.I.Yogyakarta

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 dpk.bantenprov.go.id 1%
Internet Source

2 slemankec.slemankab.go.id 1%
Internet Source

3 jim.unsyiah.ac.id 1%
Internet Source

4 repository.upi.edu 1%
Internet Source

5 jmr2012.combine.or.id <1%
Internet Source

6 journal.student.uny.ac.id <1%
Internet Source

7 ejournal.unkhair.ac.id <1%
Internet Source

8 journal.uwks.ac.id <1%
Internet Source

koleksipengetahuan.wordpress.com

| | | |
|----|---|------|
| 9 | Internet Source | <1 % |
| 10 | www.psikologi.net Internet Source | <1 % |
| 11 | www.researchinlanders.be Internet Source | <1 % |
| 12 | digilib.poltekkesdepkes-sby.ac.id Internet Source | <1 % |
| 13 | journal.ipb.ac.id Internet Source | <1 % |
| 14 | www.academia.edu Internet Source | <1 % |
| 15 | www.slideserve.com Internet Source | <1 % |
| 16 | dinatropika.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 17 | thedjavu1.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 18 | akuntku.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 19 | jurnalakrab.kemdikbud.go.id Internet Source | <1 % |
| 20 | Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper | <1 % |

| | | |
|----|---|------|
| 21 | journal.stainkudus.ac.id Internet Source | <1 % |
| 22 | lib.ui.ac.id Internet Source | <1 % |
| 23 | sinta3.ristekdikti.go.id Internet Source | <1 % |
| 24 | ejournal.kemenparekraf.go.id Internet Source | <1 % |
| 25 | Submitted to Coventry University Student Paper | <1 % |
| 26 | aimos.ugm.ac.id Internet Source | <1 % |
| 27 | blog.igi.or.id Internet Source | <1 % |
| 28 | www.lib.kobe-u.ac.jp Internet Source | <1 % |
| 29 | jurnal.umj.ac.id Internet Source | <1 % |
| 30 | mpra.ub.uni-muenchen.de Internet Source | <1 % |
| 31 | Submitted to Universitas Jambi Student Paper | <1 % |
| 32 | Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | <1 % |

33

Wihalminus Sombolayuk, Ria Mardiana Yusup, Indrianty Sudirman. "STUDI HUBUNGAN ANTARA MODAL MANUSIA, MODAL SOSIAL, DAN MODAL KEUANGAN DENGAN STRATEGI INOVASI PERUSAHAAN UKM", SIMAK, 2019

Publication

<1 %

34

ejournal.undiksha.ac.id

Internet Source

<1 %

35

perdesaansehat.com

Internet Source

<1 %

36

sosek.ub.ac.id

Internet Source

<1 %

37

www.acys.info

Internet Source

<1 %

38

Submitted to AUT University

Student Paper

<1 %

39

Submitted to Universitas Respati Indonesia

Student Paper

<1 %

40

ejournal.unesa.ac.id

Internet Source

<1 %

41

www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id

Internet Source

<1 %

42

Submitted to Universitas Maritim Raja Ali Haji

Student Paper

<1 %

| | | |
|----|--|------|
| 43 | repository.uinsu.ac.id Internet Source | <1 % |
| 44 | repository.unib.ac.id Internet Source | <1 % |
| 45 | wiki.straightjacketstudio.com Internet Source | <1 % |
| 46 | M Mukhibat. "Konstruksi Harmoni Keberagaman Masyarakat Pedesaan Berbasis Masjid", Proceeding of Community Development, 2018 Publication | <1 % |
| 47 | eprints.unsri.ac.id Internet Source | <1 % |
| 48 | repository.unjaya.ac.id Internet Source | <1 % |
| 49 | etd.repository.ugm.ac.id Internet Source | <1 % |
| 50 | journal.ui.ac.id Internet Source | <1 % |
| 51 | repository.iiq.ac.id Internet Source | <1 % |
| 52 | riaupos.jawapos.com Internet Source | <1 % |
| 53 | tirto.id Internet Source | <1 % |

| | | |
|----|--|------|
| 54 | cs.unsyiah.ac.id Internet Source | <1 % |
| 55 | e-journal.unair.ac.id Internet Source | <1 % |
| 56 | nasythaamukadar.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 57 | repository.uin-suska.ac.id Internet Source | <1 % |
| 58 | republika.co.id Internet Source | <1 % |
| 59 | Farichatun Nisa'. "MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR, PUTING BELIUNG, DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN JOMBANG", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2014 Publication | <1 % |
| 60 | etd.uum.edu.my Internet Source | <1 % |
| 61 | mierzh.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 62 | syahriartato.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 63 | DEWITA DEWITA, Emi Roslinda, Siti Masitoh Kartikawati. "Modal Sosial Masyarakat Dusun Melayang dalam Pemanfaatan Buah | <1 % |

Tengkawang di Hutan Adat Pikul", jurnal
TENGGAWANG, 2020

Publication

64

Youdi ., Mamahit, Welson M. Wangke, Nortje
M. Benu. "KAJIAN MODAL SOSIAL PADA
KELOMPOK TANI DI DESA TUMANI
KECAMATAN MAESAAN KABUPATEN
MINAHASA SELATAN (Kelompok Tani Esa
Waya dan Kelompok Tani Sinar Mas)", AGRI-
SOSIOEKONOMI, 2016

<1 %

Publication

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Akomodasi Modal Sosial Inklusif Difabel Siaga Bencana (Difagana) Dalam Sistem Manajemen Bencana Berbasis Masyarakat di D.I.Yogyakarta

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15
